

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Adi Rinto, *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

Adisubrata Winarna Surya, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999).

Asshidiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Djohan Djohermansyah, *Problematic Pemerintahan dan Politik Lokal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

Hasan M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Huda Ni' matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012).

H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Indrati Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Kansil C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

Manan Bagir, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995).

Misdayanti dan R.G. Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).

Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktek, Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007).

Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Prakoso Djoko, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Ranggawidjaja Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998).

Rawasita Reny, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2009).

Romli Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Sarundajang, *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).

Soejito Irawan, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Soemitro, Ronny Hannitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jurnal

Asmawi. 2014. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN: Jurnal Cita Hukum Vol.1No.1.

A.A Oka Mahendra. 2006. *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 1.

Bambang Iriana Djajaatmadja. 2006. *Peranan DPRD Dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangandi Daerah*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 1.

Evandy Aristo. 2016. *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum*. Universitas Lampung: Jurnal Fiat Justisia Volume 10 No.4.

Sri Maulidiah. 2016. *Desain Pemerintahan Daerah Yang Ideal Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Universitas Islam Riau: Jurnal Siasat Volume 10 No. 1.

Yuniar Kurniawati. 2016. *Polemik Pengujian Peraturan Daerah (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman versus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.4.

Zaelani. 2011. *Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 4.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib DPRD.

Wawancara

Fajar Rinawan Sitorus, S.H., *Wawancara*, Ketua Badan Pembentukan Perda, (Semarang: 18 Desember 2017).

Linna Aliana, *Wawancara*, Anggota Dewan Komisi A, (Semarang: 17 Desember 2017).

Suharsono, *Wawancara*, Anggota Dewan Komisi C, (Semarang: 27 Februari 2018).

Surya P., *Wawancara*, Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Semarang, (Semarang: 11 November 2017).

Wachid Nurmiyanto, *Wawancara*, Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda, (Semarang: 1 Maret 2018).

Website

<http://economicpeople.blogspot.co.id/2016/05/otonomi-daerah.html>
diakses pada 26/10/17 22:25.

<http://dprd.semarangkota.go.id/page/sejarah> diakses pada 12/12/17 08:25

https://www.kompasiana.com/kevinry00/pelaksanaan-otonomi-daerah-di-indonesia_58384b065eafbd2909e87f73 diakses pada 07/10/17 22:38

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia diakses pada 17/10/17 22:45

<https://kbbi.web.id/otonomi> diakses pada 22/10/17 15:30.